PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA X

Rosidayani Sipayung

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The role of taxes in national development is more important lately. Especially in conditions of economic crisis that hit Indonesia, so the factors of state revenues in the State Budget that is sourced from taxes become a major revenue source. Tax revenue can be caused by tax collection and the number of taxpayers registers billing in order to pay off the tax debt tax insurer through verification activities / research conducted by the Tax Office and the taxpayer or the relevant reports in the framework of the accuracy of the data. The purpose of this study is to determine the effect of tax collection and the number of registered taxpayers of the income tax revenue in West Java DJP I. The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method used to describe the variable tax collection, tax collection variable, and the variable reception of income tax, whereas the verification is to find out the relationship between the tax collection and the number of registered tax payers of tax on income tax revenue. It aims to determine the effect of tax collection and the number of registered taxpayers to tax revenues income used in statistical testing. The test statistic used the calculation of the classical assumption test, multiple regression equation, correlation coefficient, determination coefficient and hypothesis test used software SPSS 20 for windows.

Keyword: tax collection, the number of registered taxpayers, income tax revenue

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama sektor perekonomian (Desi Handayani, 2008). Masih menurut Desi Handayani (2008), dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat (Siti Kurnia, 2010). Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Soemarso, 2007).

Peran penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008). Untuk itu negara memiliki keabsahan, wewenang untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak (Safri Nurmantu, 2003). Dengan pajak sebagai salah satu pos . penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban wajib pajak tersebut dimaksudkan utuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak yang lain (Waluyo,2011:103).

Kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang berasal dari orang pribadi jauh lebih kecil dibandingkan PPh Badan. Fenomena ini justru terbalik dengan kondisi di luar negeri dimana PPh orang pribadi lebih besar dari PPh badan. Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis(29/1/2009).

Menurut Dedi Rudaedi (2011) Penagihan secara persuasif dilakukan dengan menghimbau atau melakukan konseling kepada para penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya sedangkan penagihan secara aktif merupakan serangkaian kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, meliputi kegiatan pencarian data melalui sumber data eksternal, pemblokiran rekening penunggak pajak, melakukan Cegah

dan Tangkal (Cekal) terhadap penunggak pajak dan tindakan paksa badan (*gijzeling*) terhadap penunggak pajak dengan kondisi tertentu.

Darmin Nasution (2009) mengatakan penagihan pajak diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan pajak. Namun dalam kenyatannya dalam pelaksanaan penagihan pajak dari diterbitkannya surat teguran sampai dilakukan penyitaan masih ditemukan wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya tersebut.

Menurut Rukhiyadin (2012) petugas salah satu KPP Pratama Bandung Karees pada seksi penagihan mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan masih belum optimal, hal tersebut terlihat dalam proses penagihan pajak sering menemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak tidak terealisasi atau tidak sesuai target. Masih menurut Rukhiyadin (2012) masalah mobilitas wajib pajak/penanggung pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yang tidak melaporkan alamat barunya juga mengakibatkan aparat penagihan mengalami kesulitan menagih hutang pajak tersebut.

Adanya berbagai fasilitas banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sehingga target penerimaan pajak terutama Pajak Penghasilan dapat tercapai. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mendapatkan NPWP diharapkan dapat menambah penerimaan Negara Negara dari sector pajak terutama pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan penelitian Liswatin (2005) dalam Dewi (2007), dari hasil penghitungan terdapat pengaruh wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah positif. keadaan ini menjelaskan jika terjadi kenaikan variabel sebesar satu wajib pajak terdaftar, maka penerimaan pajak penghasil akan mengalami kenaikan sebesar 0.364 milyar atau Rp. 364.000.000 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Departemen Keuangan menyatakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar resmi di Indonesia secara keseluruhan masih sangat sedikit. Data di tahun 2007 menunjukkan jumlah wajib pajak badan hanya 1,35 juta dan wajib pajak orang pribadi hanya 5,14 juta. Jumlah ini terlampau kecil bila dibandingkan dengan total usia produktif di Indonesia yang mencapai 170 juta. Untuk tahun 2011 saja terdapat 67 persen dari empat juta pemilik NPWP dilaporkan tidak menyerahkan SPT pajak. Kondisi itu terjadi antara lain diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan petugas pajak. (Darmin Nasution : 2011). Didasari oleh permasalahan diatas inilah penulis ingin meniliti permasalahan ini sebagai penyusunan skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada X.
2. Seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pada X.

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada X.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pada X

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai pengaruh penagihan pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan.

1.5 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah atas fenomena yang peneliti lakukan mengenai pengaruh penagihan pajak dengan dan jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan .

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti
   a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khusunya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama perkuliah.
   b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal pengaruh penagihan pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan cara membandingkan teori dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Manfaat bagi Pembaca
   a. Menambah wawasan mengenai pemahaman peraturan perundang-undangan.
   b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian secara mendalam, khususnya pada permasalahan yang serupa.
   c. Untuk mendapatkan gelar Strata 1
3. Bagi Wajib Pajak
   a. Diharapkan dapat memberi manfaat, menambah wawasan wajib pajak dalam pemahaman peraturan perundang-undangan.
   b. Diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak.
      Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.

II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:119) adalah sebagai berikut: "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau meperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan, penyitaan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita".

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rayahu (2010:68) adalah sebagai berikut: "Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan pajak meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas".

Adapun indikator penagihan pajak adalah Jumlah pencairan tunggakan pajak ditahun 2011-2014 padaKPP di Kanwil DJP Jawa Barat.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:35) wajib pajak adalah sebagai berikut:
"Orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (pasal 1 butir 2 UU KUP). yang wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah wajib pajak (subyek penghasilan)".

Adapun indikator penagihan pajak adalah Jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2011-2014 pada KKP di Kanwil DJP Jawa Barat I.

2.1.3 Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Rimsky K.Judisseno (2004:50) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

"Suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Perlu ditegaskan disini, yang dimaksud objek pajak penghasilan yang sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh no.17 tahun 2000 adalah penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak".

Adapun indikator penagihan pajak adalah Penerimaan pajak penghasilan. Pada tahun 2011-2014 pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kewajiban pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang. Kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada Negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal **penagihan pajak** adalah untuk memastikan bahwa **penerimaan pajak** oleh Negara dapat dipenuhi. (Soemarso S.R 2007).

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar.Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan (Waluyo, 2009:238).

2.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, dimana Jika jumlah wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pada KPP di lingkungan kantor Wilayah DJP Jawa Barat I juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:90) yang menyatakan bahwauntuk menunjang penerimaan Negara dalam bidang perpajakan dapat ditempuh salah satunya dengan cara perluasan dan peningkatan wajib pajak.

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan peneelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkana pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah H1: Pengaruh Penagihan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kanwil DJP Jawa Barat I.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang dijadikan sumber topic untuk penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Peneliti bisa mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian ynag dilakukan agar tujuan penelitian tercapai.

Objek penelitian dalam penyusunan Metode Penelitian ini adalah Penagihan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerimaan Pajak Penghasilan.penelitian ini dilakukan pada Kanwi DJP Jawa Barat I.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek penelitian.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah ke satu, dua dan tiga. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lajut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan ditarik kesimpulan.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Moh. Nazir (2003:84) adalah sebagai berikut:

“Semua proses yang diperlakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Dalam pengertian yang lebih sempit desain penelitian ini penulis menetapkan desain penelitian dalam pengertian yang lebih luas, desain penelitiannya mencakup proses-proses sebagai berikut:

1. Penentuan tema, topik dan judul penelitian
   Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tema penelitian. Tema bisa didapatkan dari fenomena yang sedang terjadi dan dapat diketahui melalui surat kabar, internet, forum ilmiah atau pun pengalaman pribadi. Setelah menetapkan tema, maka dilajutkan dengan penetapan topik penelitian yang berkaitan dengan garis pembahasan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan judul untuk memperjelas ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian.
2. Menentukan identifikasi dan rumusan masalah
   Identifikasi masalah adalah pendeskripsian permasalahan – permasalahan apa saja yang sedang terjadi dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan – pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data.
3. Mencari konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan.
   Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis), maka peneliti dapat mencari referensi teoritis yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Selain itu, penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban semntara terhadap masalah penelitian.
4. Pengujian Hipotesis
   Hipotesis merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang akan baru didasarkan kepada teori didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan belum ada pembuktian secara empiris.
5. Metode Penelitian
   Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat memilih metode penelitian yang sesuai. Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penarikan sampel dengan metode *non probability purposive sample*. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan dari tahun 2011 – 2014.

6. Pengujian statistik
   Peneliti menggunakan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yang akan dipakai untuk memutuskan apakah uji hipotesis dapat terbukti atau tidak kebenarannya. Penelitian ini menguji adanya Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak.
7. Membuat kesimpulan dan saran.
   Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

3.4 Operasional Variabel

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis teliti, yaitu Pengaruh Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kanwi DJP Jawa Barat I, maka terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah suatu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, bahkan variabel independen merupakan faktor penyebab yang akan mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini, variabel independen (X) adalah penagihan pajak dan wajib pajak pajak terdaftar.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel tergantung adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainya. Dalam hal ini, variabel dependen adalahpenerimaan pajak penghasilan.

3.5. Penarikan Sampel dan Populasi

1. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu laporan penagihan pada seksi penagihan Kanwil DJP Jawa Barat I.

2. Sampel

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Untuk teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh penulis yang sesuai dengan judul yang diteliti adalah *nonprobability sampling*.

3.6 Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokoerlasi. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:111).

1) Uji Kolmogrov Smirnov

Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

a) Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal

b) Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal

2) Histogram

Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara normal.

3) Grafik Normality Probability Plot

Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah:

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel -variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini disebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah:

- Koefisien - koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir,
- Nilai *standar error* setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2005:105), uji heteroskedastisitas bertujuan mengujiapakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2005:95). Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Waston (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1) angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif,
2) angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi,
3) angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

2. Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

3.7 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji satistik t dengan langkah-angkah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Penagihan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan. Hipotesis statistika dari penelitian ini adalah :
   Ho : $\beta_2 = 0$ tidak dapat pengaruh yang signifikan Penagihan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan.
   Ha : $\beta_2 \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan Penagihan Pajak Dengan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
   Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Pengaruh Penagihan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan.
b. Hipotesis statistika dari penelitian ini adalah
   Ho: $\beta_1 = 0$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan.
   Ha: $\beta_1 \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan.
c. Menentukan tingkat signifikan
   Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hububgan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam satu penelitian.
d. Menghitung nilai t_{hitung} dengan mengetahui apakah variabel koefisien korelasi signifikan atau tidak dengan rumus :
e. Kemudian dibuat kesimpulan mengenai diterima tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan kriteria :
   1. Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien positif.
   2. Tolak Ho jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien negative.
   3. Tolak Ho jika nilai t-sign < 0,05.

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menguji adanya hubungan antara variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y) maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistika F dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas Pengaruh Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
b. Menentukan nilai signifikan yaitu 5% atau 0,05 dan derajat bebas (db = n – k – 1), untuk mengetahui daerah F_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakkan.

Hasil F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan kriteria:

a. Tolak Ho jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien positif.
b. Tolak Ho jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien negatif.
c. Tolak Ho jika nilai F-sign <) 0,05.

3. Penarikan kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan) maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak).

4.1.1 Analisis Deskriptif

1.1.2.1 Deskriptif Penagihan Pajak pada X

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah pencairan tunggakan pajak yang dicairkan di 10 KPP pada 2011-2014 berbeda pada tiap KPP, jumlah pencairan tunggakan pajak tertinggi terdapat di KPP Madya Bandung yaitu sebesar Rp.161.072,326,512 dan terendah terdapat di KPP Pratama Bandung Cicadas sebesar Rp.4,907,144,348. Hal tersebut disebabkan masih banyak masalah tersebut terlihat dalam proses penagihan pajak sering menemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan bertambahnya tunggakan pajak.

1.1.2.2 Deskriptif Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada X

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar yang ada di 10 KPP pada 2011-2014 berbeda pada tiap KPP, jumlah wajib pajak terdaftar tertinggi terdapat di KPP Pratama Tasikmalaya yaitu sebesar 1103.689 dan terendah terdapat di KPP Madya Bandung sebesar 1071. Hal tersebut disebabkan masih banyak masalah tersebut terlihat dalam penyampaian SPT. Banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT mengakibatkan jumlah wajib pajak terdaftar semakin sedikit.

1.1.2.3 Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan pada X

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah pencairan tunggakan pajak yang dicairkan di 10 KPP pada 2011-2014 berbeda pada tiap KPP, realisasi penerimaan pajak penghasilan tertinggi terdapat di KPP Madya Bandung yaitu sebesar Rp. 3,945,286,312,233 dan terendah terdapat di KPP Pratama Majalaya sebesar Rp. 47,578,822,256. Penerimaan pajak yang hampir selalu tidak mencapai target disebabkan masih terdapat masalah kepatuhan dalam hal pembayar pajak tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga berimbas pada penerimaan yang tidak mencapai target.

4.1.3 Analisis Verifikatif

a. Pengaruh Penagihan pajak dan Jumlah wajib pajak terdaftar terhadap Penerimaan pajak penghasilan pada X.

Berdasarkan korelasi antar variabel pada table 4.8. Hubungan penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan tergolong dalam kriteria korelasi moderat atau cukup dengan hasil yang diperoleh sebesar 0,451. Hubungan Jumlah wajib pajak terdaftar dengan Penerimaan pajak penghasilan tergolong dalan kriteria korelasi erat hasil yang diperoleh adalah -0,635.

Jadi secara simultan kedua variabel bebas (Penagihan pajak dan Jumlah wajib pajak terdaftar) memiliki hubungan yang kuat/tinggi dengan Penerimaan pajak penghasilan Pada Kanwil DJP Jawa Barat I.

b. Pengaruh Penagihan pajak dan Jumlah wajib pajak terdaftar terhadap Penerimaan pajak penghasilan pada X.

Koefisien jalur untuk pengaruh dari masing-masing variabel terlihat pada kolom koefisien jalur dari hasil perhitungan SPSS 23. Diperoleh untuk pengaruh penagihan pajak (X1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) memiliki koefisien jalur dengan nilai sebesar 0,142 untuk pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar (X2) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) memiliki koefisien jalur dengan nilai sebesar 0,556.

c. Pengaruh Penagihan pajak dan Jumlah wajib pajak terdaftar terhadap Penerimaan pajak penghasilan pada X.

Berdasarakan pengujian hipotesis pada table 4.11 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=40-2-1= 37, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ± 1,687. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0.940, berada dalam nilai t_{tabel} (-0.940 dan 0.940). sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, artinya secara parsial penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikanpenulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor X Semakin tinggi penagihan pajak akan semakin meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor X. Kepatuhan wajib pajak dalam menunjang penerimaan pajak masih belum optimal, masih saja terdapat masalah yang ditandai dengan:
   a. Menemukan sejumlah kelemahan strategi, administrasi, sumber daya manusia, hingga pengawasan dalam penagihan piutang pajak yang berakibatkan penagihan piutang pajak kurang efektif dan tidak optimal.
   b. Penerimaan pajak tidak mencapai target.
2. jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dan dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berbanding searah dengan penerimaan pajak penghasilan yang dilaporkan yang dimana jumlah wajib pajak terdaftar meningkat maka penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat.

5.2 Saran

1. Penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, maka diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Kantor X agar:
   a. Tegas dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan menggunakan surat paksa karena sudah berdasarkan hukum.
   b. Meningkatkan kuantitas bagian penagihan pajak setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
   c. Meningkatkan kualitas penagihan pajak.

2. jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada setiap kantor Pelayanan Pratama dan Madya di Kantor X agar :
   a. X melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar supaya membayar pajak yang telah ditentukan di dalam undang-undang yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan.